

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.
- Bahri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT Hidayakarya Agung, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Choirul Anam, 2016, *"Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Sebuah Laporan Awal,"* Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Dadar Junaidi & Dorce Tanjung, *Anomali Jiwa*, 2012, "Cara Mudah Mengetahui Penyimpangan Jiwa dan Perilaku Tidak Normal Lainnya,," Andi Offset, Jakarta
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Bahasan Indoensia Karangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Em Zul Fairi dan Ratu Aprilia Senja, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilham Gunawan, 1994, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.H. Tirtaadmijaya, 1995, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta
- Mahendra, Yusril Ihza, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Merdiyah dan Azhari Yahya, 2018, *Kewenangan Kejaksaan dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*, Legitimasi, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 1998, *"Dasar-Dasar Ilmu Politik,"* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Jusuf, 2014, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Nurddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 sampai KHI)*, Prenada Media, Cetakan Kedua, Jakarta.

- Nurhadi, 2021, *Penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur*, Mandar maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gajda Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Soetojo Prawirohadimjojo, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani dan Abdurrahman, 1977, "*Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*," Cet. II, Perpustakaan Nasional RI, Bandung.
- Rosady Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Public dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rudy T. Erwin, 1978, *Petunjuk Praktis Untuk Penyelesaian Perkara-Perkara Anda. Jilid I*. Selektia Group, Jakarta.
- Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Selayang Pandang, 2016, *Sistem Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2010, "*Hukum Perkawinan Nasional*," cet. IV, Rineka Cipta, Jakarta
- W. Darmabrata & S. Ahlan Siarif, 2002, "*Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*," Rizkita, Jakarta.
- Wahyono Dammabrata, 2008, *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Rizkita, Jakarta.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Siarif, 2015, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ed. 1, cet. 3, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Maryopan Tujuh, Pekanbaru.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Bab II huruf B Nomor 2 point b PERJA Nomor PER-025/a/ja/11/2015 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pengakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

PERJA Nomor PER-025/a/ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

C. Jurnal dan Skripsi

Ahud Misbahuddin, 1998, "Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan." Dalam *Mimbar Hukum*. No 39 Tahun IX, 1998.

Alimin mesra, 2018, "*Verifikasi Identitas Bilogis Menjelang Perkawinan Dalam Persektif Fikih*," *Jurnal Ahkam*, Vol. 21, No. 2, 2018.

Ateng Syafrudin, 2000, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*," *Jurnal Pro Justitia* Edisi IV, 2000.

Jery Susanto, 2010, "*Kewenangan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan*," Disertasi Skripsi Fakultas Syaria'ah Program Studi Ahwal Al Syakhsiiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Jakarta.

Merdiyah dan Azhari Yahya, 2018, "*Kewenangan Kejaksaan dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*," *Jurnal LEGITIMASI*, Vol. VII, No. 1, 2018.

Muhammad Akbar S, 2022, "*Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan*," *Jurnal Unpak*, Vol. 08, No. 01, 2022.

Muhammad, I., 2018, "*Pemisahan Harta dalam Perceraian di Era Pasca-Perkawinan Beda Agama*," Disertasi Skripsi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Vivi Hayati, 2019, "*LGBT dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 2, 2019.

D. Internet

Nanang Fahrudin, “Kewenangan Jaksa Mengajukan Pemohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” <https://repository.unej.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58978/1/Nanang%0Fahrudin.pdf> dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2023 Jam 19.54.

